1. PROFIL ORGANISASI

1.1PROFIL INSTANSI

A. KELURAHAN MANGKUPALAS

Mangkupalas adalah salah satu dari beberapa Kampung Kuno dan Kampung Bahari di jaman kesultanan Kutai.

Pada Tahun 2014 terjadi pemecahan Kelurahan sesuai dengan SK dari Walikota bahwa Kelurahan Masjid dibagi menjadi tiga bagian yaitu, Kelurahan Masjid sebagai Kelurahan Induk, selanjutnya Kelurahan Mangkupalas dan Kelurahan Pertenunan Samarinda.

Kelurahan Mangkupalas sesuai dengan SK bertanggal 14 Agustus 2014 secara regulasi dan secara Undang-undang sudah Sah berdiri dan aktif di awal Januari 2015 tepatnya 5 Januari 2015.

Kelurahan Mangkupalas terdiri dari 19 RT mengingat luasnya juga berbatasan dengan sisi Selatan adalah Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran, Sisi Timur itu dengan Sungai Mahakam, Sisi Utara berbatasan dengan Kelurahan Masjid dan Sisi Barat berbatasan dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loajanan Illir.

Kelurahan Mangkupalas itu berbatasan dengan dua Kecamatan yaitu Kecamatan Palaran dan Kecamatan Loajanan Illier. Kelurahan Mangkupalas mulai aktif beraktifitas di 5

Januari 2015 dengan berkantor di Jalan SMP 8 tepatnya di Wilaya RT.08 Kelurahan Mangkupalas. Beberapa Bulan kurang lebih hampir 1 Tahun pindah akibat Kantor yang ditempati ada sedikit masalah sengketa dengan pemilik Keluarganya sehingga secara otomatis saat itu Pemerintah Kelurahan Mangkupalas Pindah ke Jalan Pattimura tepatnya di RT.06 Blok K, tidak lama kemudian kurang lebih jalan 1 Stenga 2 tahun karna Kondisi Ruko yang di tempati sempit dan kurang memadai dan kurang layak untuk menjadi sebuah kantor sehingga Kelurahan Mangkupalas Berinisiatif pindah kembali di Jalan Pattimura dikompleks Room Ruko Rumyuka Blok G3 dan berhadapan langsung dengan Masjid Albadar, hingga saat ini sejak awal Tahun 2017 sampai sekarang masi menempati Kompleks Ruko Rumyuka Blok G3. Sejak Seringnya Pertemuan Sosialisasi dalam hal ini LPM Kelurahan Mangkupalas tetap setiap ada Momentum Sosialisasi Momentum Musrenbang dan Momentum yang berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut Fasilitas yang mengkoordisikan kegiatan Pemerintahan LPM dan beberapa elemen lainya tentang Pemerintah Kecamatan Pemerintah Kota Samarinda agar Pemerinta Mangkupalas itu bisa punya Kantor sendiri, beberapa Kali kami sebagai LPM itu selalu meminta kepada pemerintah termasuk juga kepada Legislatif dalam hal ini Anggota Dewan untuk Mempalitasi memperjungkan adanya Kantor Pemerintahan Kelurahan Mangkupalas yang bisa kita miliki secara permanen dan idela serta strstegis

Dijaman Pemerintahan Walikota Andi Harun hal ini Akhirnya menjadi perhatian setelah beberapa kali LPM terus-menerus mengangkat persoalan ini dan juga terus berkoordinasi dengan DPR Walikota Samarinda Eksekobang dan Eksekutif dan lain-lain akhirnya kebijakan dari Pemerintah Kota Samarinda untuk Mempasiitaslan adanya kantor Lurah yang secara Permanen yang dimiliki oleh Pemerintah maka diputuskan membeli Ruko di Posisi Jalan Pattimura RT.15 Kelurahan Mangkupalas yang akan ditempati di Bulan 6 2023

Begitulah Proses Tahapan-Tahapan Proses Kronologis Sejarah Tentang Kantor Kelurahan Mangkupalas. Saat ini masi menempati Ruko yang di sewa dengan kondisi yang cukup strategis Tiga Lantai.dan Kantor baru yang dibeli oleh Pemerintah dengan 2 Lantai dengan dua Pintu. Demekian Kronologis dari Sejarah Kelurahan Mangkupalas

B. DATA UMUM KELURAHAN MANGKUPALAS

PERATURAN MENTRI DALAM NEGRI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN

1. Nama Kelurahan	: Kelurahan Mangkupalas
2. Tahun Pembentukan	: 2014
3. Dasar Hukum Pembentukan	: Perda No.78 Tahun 2020
4. Nomor Kode Wilaya	: 64.72.02.1009
5. Nomor Kode Pos	: 75133
6. Alamat Kantor Kelurahan	: Jln, Pattimura RT.015 Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.
7. Kecamatan	: Kecamatan Samarind Seberang
8. Kabupaten/ Kota	: Samarinda
9. Provinsi	: Kalimantan Timur

C. SEJARAH KELURAHAN MANGKUPALAS

Pada saat pecah perang Gowa, pasukan Belanda di bawah Laksamana Speelman memimpin angkatan laut Kompeni menyerang Makassar dari laut, sedangkan Arung Palakka yang mendapat bantuan dari Belanda karena ingin melepaskan Bone dari penjajahan Sultan Hasanuddin (raja Gowa) menyerang dari daratan. Akhirnya Kerajaan Gowa dapat dikalahkan dan Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667.

Sebagian orang-orang Bugis Wajo dari kerajaan Gowa yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian Bongaja tersebut, mereka tetap meneruskan perjuangan dan perlawanan secara gerilya melawan Belanda dan ada pula yang hijrah ke pulau-pulau lainnya di antaranya ada yang hijrah ke daerah Kesultanan Kutai, yaitu rombongan yang dipimpin oleh La Mohang Daeng Mangkona (bergelar Pua Ado yang pertama). Kedatangan orang-orang Bugis Wajo dari Kerajaan Gowa itu diterima dengan baik oleh Sultan Kutai.

Atas kesepakatan dan perjanjian, oleh Raja Kutai rombongan tersebut diberikan lokasi sekitar kampung melantai, suatu daerah dataran rendah yang baik untuk usaha Pertanian, Perikanan dan Perdagangan. Sesuai dengan perjanjian bahwa orang-orang Bugis Wajo harus membantu segala kepentingan Raja Kutai, terutama di dalam menghadapi musuh.

Semua rombongan tersebut memilih daerah sekitar muara Karang Mumus (daerah Selili seberang) tetapi daerah ini menimbulkan kesulitan di dalam pelayaran karena daerah yang berarus putar (berulak) dengan banyak kotoran sungai. Selain itu dengan latar belakang gunung-gunung (Gunung Selili).

Sekitar tahun 1668, Sultan yang dipertuan Kerajaan Kutai memerintahkan Pua Ado bersama pengikutnya yang asal tanah Sulawesimembuka perkampungan di Tanah Rendah. Pembukaan perkampungan ini dimaksud Sultan Kutai, sebagai daerah pertahanan dari serangan bajak laut asal Pilipina yang sering melakukan perampokan di berbagai daerah pantai wilayah kerajaan Kutai Kartanegara. Selain itu, Sultan yang dikenal bijaksana ini memang bermaksud memberikan tempat bagi masyarakat Bugis yang mencari suaka ke Kutai

akibat peperangan di daerah asal mereka. Perkampungan tersebut oleh Sultan Kutai diberi nama Sama Rendah. Nama ini tentunya bukan asal sebut. Sama Rendah dimaksudkan agar semua penduduk, baik asli maupun pendatang, berderajat sama. Tidak ada perbedaan antara orang Bugis, Kutai, Banjar dan suku lainnya.

Dengan rumah rakit yang berada di atas air, harus sama tinggi antara rumah satu dengan yang lainnya, melambangkan tidak ada perbedaan derajat apakah bangsawan atau tidak, semua "sama" derajatnya dengan lokasi yang berada di sekitar muara sungai yang berulak, dan di kiri kanan sungai daratan atau "rendah". Diperkirakan dari istilah inilah lokasi pemukiman baru tersebut dinamakan Samarenda atau lama-kelamaan ejaan Samarinda sehingga awal dari pendirian Kota Samarinda adalah dari sebuah kampung yang kini menjadi kecamatan Samarinda Seberang.